



Analysis of PAD, DAU, DAK, DBH and Capital Expenditures and their Effect on the Human Development Index of North Sumatra Province

Analisis PAD, DAU, DAK, DBH Dan Belanja Modal serta pengaruhnya Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Utara

Lily Syafira¹, *Kornelius Harefa², OK Sofyan Hidayat³, Muhammad Ridha Habibi⁴

^{1,2,3,4}Akuntansi, Universitas Negeri Medan, Indonesia

Keywords:

Human Development Index, Regional Original Income, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Revenue Sharing Fund, Capital Expenditure

Abstract. *The problem in this study is that there is a clear disparity in the achievement of human development in cities, which is much higher than in districts in North Sumatra province, and the government has an important role in achieving human development in a region or country. This study aims to obtain empirical evidence whether Regional Original Income, General Allocation Funds, Special Allocation Funds, Revenue Sharing Funds, and Capital Expenditures have an effect on the Human Development Index in the Regency/City of North Sumatra Province. The data used in this study is secondary data, namely the Human Development Index Report and the Report on the Realization of Revenue and Expenditure of the Regency / City Government of North Sumatra Province in 2015-2018. The population in this study were all regencies / cities in North Sumatra Province which consisted of 28 regencies and 5 cities. The method used in determining the sampling is Saturated Sampling (saturated sampling). This study uses multiple regression analysis. The results of the study show that Regional Original Income, General Allocation Funds and capital expenditures have an effect on the Human Development Index. Meanwhile, the Special Allocation Fund and Revenue Sharing Fund have no effect on the Human Development Index.*

Corresponding author*

Email: korneliusharefa@unimed.ac.id

1. PENDAHULUAN

UNDP (1990) menempatkan manusia sebagai kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup manusia (masyarakat/ penduduk), dan menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Bahkan saat ini, IPM merupakan tantangan pembangunan nasional di Indonesia sehingga perlu adanya perhatian besar dalam meningkatkan pembangunan manusia.



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)

e-ISSN. 2723-5947



Berdasarkan BPS Sumut (2018), IPM di Sumatera Utara dari tahun 2014-2018 mengalami pertumbuhan rata-rata 0,84% per tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa IPM di Sumatera Utara semakin membaik setiap tahun. Namun masalah disparitas pembangunan manusia tetap tidak bisa dihilangkan. Disparitas jelas terlihat dalam capaian pembangunan di kota yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten. Tahun 2018, capaian IPM paling tinggi untuk wilayah kota adalah Kota Medan dengan IPM mencapai 80,65 sedangkan capaian IPM untuk wilayah kota yang paling rendah yaitu Kota Tanjung Balai dengan IPM sebesar 68,00. Sementara itu capaian IPM paling tinggi untuk wilayah kabupaten adalah Kabupaten Deli Serdang dengan angka IPM sebesar 74,92 dan capaian IPM terendah untuk wilayah kabupaten yaitu Kabupaten Nias Barat dengan IPM sebesar 60,42. IPM Sumatera Utara tahun 2018 sebesar 71,18 dan menduduki ranking ke 12 untuk tingkat nasional, namun angka IPM Sumatera Utara masih dibawah angka Nasional yang mencapai 71,39.

Walaupun disparitas bukan merupakan hal yang baru dalam masalah pembangunan manusia di Indonesia khususnya Sumatera Utara, tetapi masalah disparitas ini harus menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah harus bisa mempertimbangkan beberapa daerah yang harus diprioritaskan dalam peningkatan pencapaian pembangunan manusia demi mengurangi perbedaan atau kesenjangan antar wilayah. Pada hakikatnya pembangunan nasional itu harus bisa dirasakan oleh semua pihak secara merata, karena setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk merasakan dampak dari pembangunan.

Berdasarkan uraian diatas banyak fenomena dan masalah yang terjadi berkaitan dengan pembangunan manusia dan dikarenakan adanya riset gap pada penelitian terdahulu maka peneliti merasa perlu untuk meneliti kembali tentang pengaruh PAD, DAU, DAK, DBH dan Belanja Modal terhadap IPM. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Belanja Modal berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.

2. KAJIAN LITERATUR

2.1 Teori Keagenan

Jensen dan Meckling (1976:308) mengemukakan “agency relationship as a contract under which one or more persons (the principal(s)) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent”. Teori ini menunjukkan bahwa hubungan keagenan merupakan suatu bentuk persetujuan (kontrak) di antara dua pihak yaitu prinsipal dan agen, untuk melaksanakan suatu pekerjaan atas nama prinsipal yang mana untuk mengambil keputusan diberikan wewenang kepada agen.

Berdasarkan Pratiwi dan Nurdiawansyah (2019) teori keagenan terlihat pada hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Melalui kebijakan pendelegasian dana perimbangan yaitu pemerintah pusat sebagai prinsipal dan pemerintah daerah sebagai agen memiliki tanggung jawab untuk menggunakan dana tersebut untuk membiayai belanja daerahnya atas pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat. Hubungan keagenan juga digambarkan dalam hubungan antara pemerintah daerah sebagai agen dengan masyarakat



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)

e-ISSN. 2723-5947



sebagai prinsipal, selama ini masyarakat sudah membayar pajak, retribusi dan lain-lain kepada pemerintah daerah dan seharusnya mereka mendapatkan imbalan dari pemerintah daerah selaku pengelola keuangan daerah.

2.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Berdasarkan Badan Pusat Statistik, IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Dalam penelitian ini pengukuran variabel IPM dilakukan dengan melihat angka capaian IPM tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2015-2018.

2.3 Pendapatan Asli Daerah

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 “Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Dalam penelitian ini Pendapatan Asli Daerah diprosikan melalui realisasi Pendapatan Asli Daerah.

2.4 Dana Alokasi Umum

Berdasarkan UU RI No 33 Tahun 2004 “Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi”. Dalam penelitian ini Dana Alokasi Umum diprosikan melalui realisasi Dana Alokasi Umum.

2.5 Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan UU RI No 33 Tahun 2004 “Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional”. Dalam penelitian ini Dana Alokasi Khusus diprosikan melalui realisasi Dana Alokasi Khusus.

2.6 Dana Bagi Hasil

Berdasarkan UU RI No 33 Tahun 2004 “Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi”. Dalam penelitian ini Dana Bagi Hasil diprosikan melalui realisasi Dana Bagi Hasil.

2.7 Belanja Modal

Berdasarkan PP 71 Tahun 2010 “belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi”. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud. Dalam penelitian ini Belanja Modal diprosikan melalui realisasi Belanja Modal.

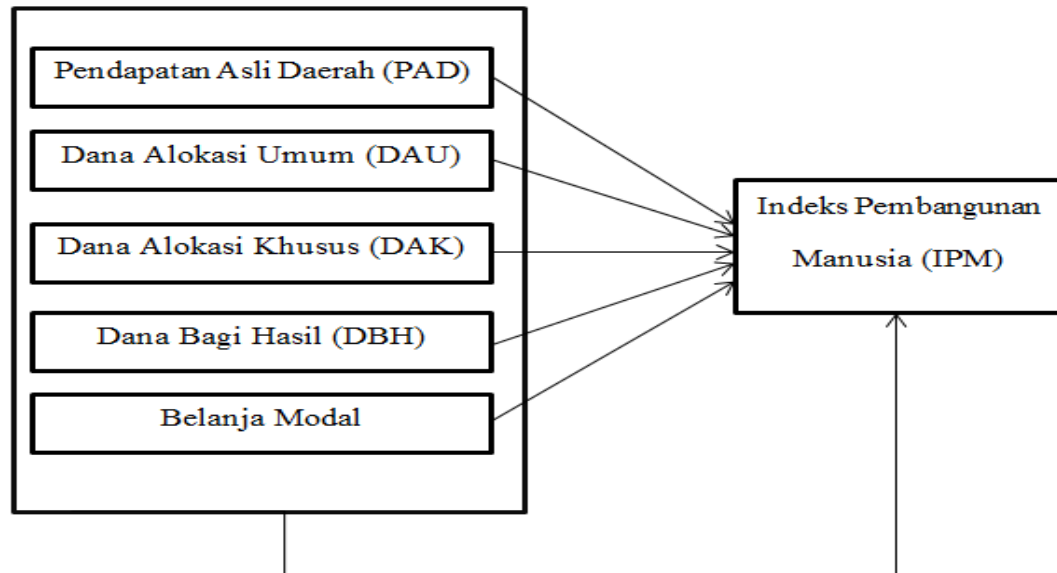
Berikut kerangka berpikir yang menunjukkan pengaruh antar variabel dalam penelitian ini :



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)

e-ISSN. 2723-5947



Gambar 1. Kerangka Penelitian

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Berdasarkan Siyoto (2015:17) penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak menuntut penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Dan akan dijabarkan secara deskriptif berdasarkan hasil olahan data. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari 25 Kabupaten dan 8 Kota. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan dalam penentuan sampling adalah Saturated Sampling (sampling jenuh).

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu berupa Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara tahun 2015-2018 dan Laporan Indeks Pembangunan Manusia tahun 2015-2018 yang diunduh melalui situs Badan Pusat Statistik Sumatera Utara <https://sumut.bps.go.id/>. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, menggunakan uji asumsi klasik dengan analisis regresi berganda.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)

e-ISSN. 2723-5947



Tabel 1. Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	67,385	1,099	
PAD	,009	,003	,554
DAU	,008	,003	,517
DAK	-,007	,006	-,137
DBH	,011	,007	,137
BELANJA MODAL	-,016	,006	-,530

a. Dependent Variable : IPM

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda diatas, maka persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$IPM = 67,385 + 0,009 PAD + 0,008 DAU - 0,007 DAK + 0,011 DBH - 0,016 BM.$$

Berdasarkan tabel hasil uji diatas dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Modal berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Sementara Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Tabel 2. Hasil Uji Simultan

ANOVA^b

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	988,216	5	197,643	12,336	,000 ^a
	Residual	2018,797	126	16,022		
	Total	3007,013	131			

a. Predictors: (Constant), BELANJA MODAL, DAK, DBH, DAU, PAD

b. Dependent Variable: IPM

Karena F_{hitung} lebih besar daripada F_{tabel} ($12,336 > 2,29$) dan nilai probabilitas 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ maka dapat disimpulkan H_0 ditolak. Artinya Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan belanja modal secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara.

Pembahasan

Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap indeks pembangunan manusia berdasarkan hasil pengujian memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan H_1 diterima. Artinya Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)

e-ISSN. 2723-5947



terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pratiwi dan Nurdiawansyah (2019), Najmi (2019), Rakhmawati dkk (2017), Sari dan Supadmi (2016).

Berdasarkan Wahyu dan Dwirandra (2015) PAD yang merupakan penerimaan daerah diharapkan mampu untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik tentunya akan berdampak pada semakin sejahteranya masyarakat. Berdasarkan Sembiring (2020) daerah-daerah di Sumatera Utara sudah mampu mengelola dan menggunakan PAD dengan baik untuk sektor kesehatan, seperti sarana dan prasarana kesehatan serta pelayanan publik di bidang kesehatan lainnya.

Pengaruh dana alokasi umum terhadap indeks pembangunan manusia berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Ini menunjukkan H2 diterima. Artinya Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hasil penelitian ini sejalan dengan Wulandari dkk (2018) dan Budi (2017).

Sesuai dengan Badan kebijakan APBN (2017) bahwa peran DAU adalah sebagai instrumen untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat tetapi juga sebagai instrumen pendanaan yang mendorong pengembangan tingkat pelayanan publik dan kesejahteraan antardaerah. Seperti yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan 112/PMK.07/2017, bahwa pemerintah pusat mewajibkan Pemda untuk mengalokasikan minimal 25% Dana Transfer Umum untuk pembangunan infrastruktur. Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan dana alokasi umum dalam bentuk infrastruktur terkait pada percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi, dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan penyediaan pelayanan publik antar daerah.

Bahkan berdasarkan Badan Pusat Statistik Sumut (2018) bahwa dana perimbangan memiliki kontribusi terbesar dalam total penerimaan daerah Sumut yang dipegang oleh pos Dana Alokasi Umum. Ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh DAU sebagai sumber penerimaan untuk membiayai kebutuhan daerah Sumatera Utara.

Pengaruh dana alokasi khusus terhadap indeks pembangunan manusia berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai signifikansinya sebesar 0,207 lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Ini menunjukkan H3 ditolak. Artinya Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Pranoto dkk (2019), Rahmayati dan Pertiwi (2018).

Berdasarkan Widodo (dalam Bisnis.com, Juni 2015) bahwa DAK dinilai belum dapat menciptakan kesejahteraan di daerah dikarenakan berbagai permasalahan yang terjadi, seperti belum fokusnya penggunaan DAK untuk membiayai kebutuhan infrastruktur daerah serta penerbitan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan sering terlambat yang menyebabkan sisa DAK di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) menjadi besar.

Seperti yang terjadi di Sumatera Utara, Batubara (dalam koransindo.com, September 2016) menyatakan bahwa sistem dalam penentuan DAK adalah sistem Top Down yang mana



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)

e-ISSN. 2723-5947



sering terjadi masalah di setiap daerah di Sumatera Utara karena pemerintah pusat tidak tahu apa sebenarnya kebutuhan dan prioritas di daerah tersebut. Sehingga Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengusulkan pembiayaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan sistem Bottom Up (dari bawah ke atas) dalam bentuk proposal.

Pengaruh dana bagi hasil terhadap indeks pembangunan manusia berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai signifikansinya sebesar 0,110 lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Maka H_4 ditolak. Artinya Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rahmayati dan Pertiwi (2018), Wulandari dkk (2018).

Berdasarkan Wiliantara dan Budiasih (2016) Dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap IPM dikarenakan ada beberapa penggunaan DBH yang diatur oleh pemerintah pusat. Walaupun DBH merupakan wewenang pemerintah daerah, tetapi daerah tetap tidak bisa leluasa menggunakan DBH untuk kesejahteraan masyarakat karena adanya penggunaan dari DBH yang masih menjadi wewenang pemerintah pusat sehingga pengelolaannya ditentukan oleh pemerintah pusat. Sejalan dengan Fretes (2017) bahwa istilah block grants untuk DBH sebenarnya kurang tepat karena penggunaan dari beberapa komponen DBH masih ditentukan oleh negara berdasarkan peraturan terkait (earmarked).

Diantara PAD, DAU dan DAK di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, dana bagi hasil memiliki angka rata-rata paling kecil. Ini juga yang menyebabkan DBH tidak berpengaruh terhadap IPM. Bahkan Dana Bagi Hasil Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga masih bermasalah terkait dengan realisasi pembayaran utang Dana Bagi Hasil yang belum kunjung selesai, sehingga mengakibatkan proyek pembangunan yang sudah diproyeksi dalam APBD tahun 2018 terganggu.

Pengaruh belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,006 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Ini menunjukkan H_5 diterima. Artinya belanja modal berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hasil penelitian ini sejalan dengan Pratiwi dan Nurdiawansyah (2019), Sari dan Supadmi (2016), dan Ishak (2016).

Pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi pelayanan kebutuhan dan kepentingan publik yaitu berupa pembangunan berbagai fasilitas publik dan peningkatan kualitas layanan publik, dan untuk melaksanakan kewajiban itu maka perlu ada pengalokasian pengeluaran pemerintah salah satunya adalah belanja modal. Peran belanja modal sangat penting dalam memenuhi kepentingan publik yang nantinya akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat, seperti yang dinyatakan Pramatha dan Dwirandra (2018) bahwa belanja modal memiliki peran yang sangat penting terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam hal peningkatan sarana prasarana publik sehingga menunjang peningkatan pelayanan pada sektor publik. Sejalan dengan Dewi dan Supadmi (2016) melalui pengalokasian belanja modal yang tepat seperti pembenahan infrastruktur daerah dan peningkatan fasilitas umum akan meningkatkan produktivitas daerah, pendapatan masyarakat, dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Belanja modal yang berkaitan dengan dengan indeks pembangunan manusia adalah melalui



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)

e-ISSN. 2723-5947



pembenahan infrastruktur dan fasilitas umum, pengadaan aset sebagai investasi serta untuk pembangunan sarana pendidikan, dan kesehatan.

5. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia, maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Belanja Modal berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. PAD, DAU, DAK, DBH dan Belanja Modal berpengaruh secara simultan terhadap indeks pembangunan manusia.

Untuk penelitian selanjutnya disarankan agar menambah variabel lain di luar laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran. Masih banyak faktor lain yang bisa diteliti seperti pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, kepadatan penduduk dan sebagainya. Pemerintah daerah diharapkan melakukan upaya yang optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di setiap daerah dengan menentukan daerah prioritas agar tidak terjadi disparitas pembangunan. Perlu adanya evaluasi serta pemetaan kebutuhan prioritas dan strategis pada setiap daerah sebagai pendukung dalam pengajuan usulan DAK ke pemerintah pusat. Dan Pemda harus proaktif terhadap pengelolaan dana DAK yang diterimanya. Dalam mengatasi masalah keterlambatan penyerapan DAK dapat dilakukan dengan kebijakan penyederhanaan pemrosesan penyaluran DAK. Perlunya sosialisasi guna meningkatkan persamaan persepsi dan pemahaman terhadap berbagai kebijakan pemerintah pusat terkait penyaluran dan pemanfaatan dana pajak rokok dalam membangun kesehatan masyarakat. Perlunya transparansi dari penyaluran DBH dari pusat ke kas daerah provinsi. Serta adanya terobosan regulasi yang mengatur pengalokasian DBH untuk sampai pada program pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan kebijakan APBN. 2017. Laporan Kajian: Peningkatan Efektivitas Peranan DAU dalam Pemerataan Kemampuan Keuangan Antardaerah. fiskal.kemenkeu.go.id (diakses pada tanggal 23 Februari 2020)
- Badan Pusat Statistik Sumut. 2018. Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara 2017-2018. Medan: BPS Sumut.
- Badan Pusat Statistik. Indeks Pembangunan Manusia. www.bps.go.id (diakses pada tanggal 7 Januari 2020)
- Budi, Aris Setia. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2012-2014. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Surakarta
- Dewi, I G A Agung Astia dan Ni Luh Supadmi. (2016). Pengaruh Alokasi Belanja Rutin Dan Belanja Modal Pada Indeks Pembangunan Manusia. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol.14.1: 695-722



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)

e-ISSN. 2723-5947



- DJPK Kemenkeu. 2020. PMK Nomor 7/PMK.07/2020 Tentang Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. www.djpk.kemenkeu.go.id/ (diakses pada tanggal 7 Juni 2020)
- Fretes, Pieter Noisirifan de. (2017). Pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Kepulauan Yapen. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE. UN PGRI Kediri*. Vol. 2 No. 2:1-33
- Ishak, Jouzar Farouq. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Prosiding Semnas Fekon: 565-569*
- Jensen, Michael C dan William H. Meckling. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3: 305-360.
- Najmi, Isthafan. (2019). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia : Panel Data 23 Kabupaten/ Kota Provinsi Aceh. *Jurnal Humaniora*. Vol. 3, No. 1: 36-47
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/ PMK. 07/ 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/ PMK. 07/ 2017
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan
- Pramartha, I Made Aditya dan A.A.N.B. Dwirandra. (2018). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Belanja Modal, dan Investasi Swasta Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol.22.3: 2458-2482
- Pranoto, Edi, dkk. (2019). Pengelolaan Data Potensi Fiskal, Dana Transfer dan Belanja Daerah Determinasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Jawa Barat Menggunakan Aplikasi SPSS Ver. 22. *Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi STI&K (SeNTIK)*. Volume 3 Nomor 1: 253-263
- Pratiwi, Tia Rizna dan Nurdiawansyah. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Pada Pemerintah Daerah Di Provinsi Lampung Periode 2013-2015. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*. Vol. 10, No. 2: 99 - 118
- Rahmayati, Anim dan Imanda Firmantyas Putri Pertiwi. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Journal of Islamic Finance and Accounting*. Vol. 1 No. 1: 45-62
- Rakhmawati, Zuraida. dkk. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Periode 2010-2014). *e-Proceeding of Management*. Vol.4, No.2: 1709 – 1714
- Sari, Ida Ayu Candra Yunita dan Ni Luh Supadmi. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Pada Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.15.3: 2409-2438
- Sari, Mas Sri. 2015. DAK Belum Ciptakan Pemerataan Kesejahteraan. <https://finansial.bisnis.com/> (diakses pada tanggal 18 Juni 2020)
- Sembiring, T. A. (2020). Pengaruh pendapatan asli daerah (pad), dana alokasi umum (dau), dan dana alokasi khusus (dak) fisik terhadap pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Utara (periode 2016 – 2018). *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 5(1), 77-92.
- Siregar, Vitrianda Hilba. 2016. Pemprov Sumut Usulkan Sistem DAK Bottom Up. <http://koran-sindo.com/> (diakses pada tanggal 11 Juli 2020)
- Siyoto, Sandu dan M.Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)

e-ISSN. 2723-5947



- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
- UNDP. 1990. Human Development Report. New York: Oxford University Press
- Wahyu, I Putu Adita dan A.A.N.B Dwirandra. (2015). Kemampuan Belanja Modal Memoderasi Pengaruh PAD, DAU, DAK Dan SILPA Pada IPM. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.12.3: 546-565
- Wulandari. dkk. (2018). Effect of Original Local Government Revenues, General Allocation Funds, Special Allocation Funds, Share Funds, Other Legal Revenues, Budget Surplus/Deficit to Human Development Index Through Capital Expenditures: Case Study of Regencies/Municipalities in Indonesia. Review of Integrative Business and Economics Research. Vol. 7: 125-137